

LAPORAN KINERJA

BIRO PERENCANAAN 2021

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dikelola. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tahun 2020 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum materi yang termuat dalam laporan ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Biro Perencanaan Basarnas selama Tahun 2020. Capaian kinerja Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Biro Perencanaan. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja Biro Perencanaan secara berkelanjutan.

Jakarta, Februari 2022

Kepala Biro Perencanaan



Moh. Barokna Haulah

Pembina Utama Muda (IV/c)

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 2

1. Kedudukan 2

2. Tugas 3

3. Fungsi 3

4. Struktur Organisasi 3

C. PERMASALAHAN UTAMA 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA 5

A. RENCANA STRATEGIS 5

1. Visi Biro Perencanaan 5

2. Misi Biro Perencanaan 5

3. Tujuan, Sasaran, Program Kerja dan Kegiatan Biro Perencanaan 6

4. Prosedur Pengumpulan Data..... 21

B. PERJANJIAN KINERJA 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 24

A. CAPAIAN KINERJA 24

B. PENGUKURAN KINERJA 25

1. Sasaran: Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan..... 25

Dipindai dengan CamScanner

2. Sasaran: Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan 35

3. Sasaran: Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga 46

C. REALISASI ANGGARAN 52

BAB IV PENUTUP 54

A. KESIMPULAN 54

B. TINDAK LANJUT 54

C. DAFTAR PUSTAKA 55

Lampiran-lampiran

Dipindai dengan CamScanner

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tersusunnya laporan kinerja pelaksanaan kegiatan tahun berjalan untuk mewujudkan komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi kerja sama di lingkungan Basarnas. Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas tersebut, maka disusunlah laporan kinerja Biro Perencanaan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kegiatan selama Tahun Anggaran 2021.

Secara garis besar capaian kinerja Biro Perencanaan dapat dikatakan sangat memuaskan atau dengan kategori AA dengan rata-rata capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama sebesar 100,22%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SK.1. Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	1. Persentase kerja sama di bidang SAR	100%	100%	100%
	2. Persentase kerja sama di bidang SAR yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
SK.2. Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuanga	3. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	70	71,84	102,30%

Dipindai dengan CamScanner

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja	70,3	65,15	92,67%
	5. Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	7,5	7,98	105,20%
	6. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	94	93,8	99,79%
SK.3. Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	7. Persentase anggaran yang tidak tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	98%	99,99%	102,03%
	8. Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%	100%	100%
	9. Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	100%	100%	100%
RATA RATA CAPAIAN				100,22%

Dipindai dengan CamScanner

Hasil evaluasi Indikator Kinerja dari tiap-tiap pelaksanaan sasaran sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja, dan tingkat capaian kinerja Biro Perencanaan secara keseluruhan dapat dikatakan memuaskan, sehingga dimasa mendatang kiranya kondisi ini dapat dipertahankan bahkan jika mungkin ditingkatkan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden No 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk pengelolaan sumber daya yang ada dengan didasarkan suatu perencanaan strategis. Pertanggungjawaban dimaksud dilaporkan kepada pemberi mandat, pimpinan masing-masing instansi, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pertanggungjawaban sumber daya publik (*public resources*) ini merupakan kunci dari proses pengelolaan negara serta merupakan elemen yang utama bagi demokrasi yang sehat. Pihak legislatif, eksekutif dan masyarakat sangat ingin mengetahui, apakah pelayanan pemerintah kepada masyarakat telah di laksanakan secara efisien, efektif, ekonomis serta telah menaati hukum dan aturan yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam upaya untuk pencapaian *good governance*, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) telah mengembangkan SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya pemerintahan yang baik dan dipercaya. Secara operasional, sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Basarnas akuntabel dalam melaksanakan aktivitasnya, responsif terhadap masyarakatnya, terbuka, di percaya masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Jajaran Basarnas harus memahami lingkup akuntabilitas kinerja Basarnas yang meliputi semua kegiatan dan sasaran dalam memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kegiatan

Dipindai dengan CamScanner

yang menjadi perhatian utama adalah mengenai tugas dan fungsi, program kerja yang menjadi isu nasional, dan aktivitas dominan serta vital bagi pencapaian Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

SAKIP ini diharapkan menjadi sistem yang handal untuk memperbaiki proses-proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi dan tindak lanjut atas evaluasi, berupa perbaikan atau pemecahan atas masalah yang dihadapi secara berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan no 4 Tahun 2016 tentang Implementasi sistem SAKIP di Lingkungan Badan SAR Nasional bahwa Unit kerja eselon II diwajibkan menyusun laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja dan anggaran. Biro Perencanaan sebagai unit kerja eselon II di Basarnas melaksanakan kewajibannya dalam penyampaian laporan kinerja untuk mencapai tujuan/sasaran strategis Basarnas.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Program Prioritas Nasional tentang penyederhanaan birokrasi menuntut Basarnas untuk melaksanakan perubahan dan penyederhanaan birokrasi agar mampu menciptakan birokrasi yang dinamis sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang prima, mewujudkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), percepatan sistem kerja, serta mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai pemerintah. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Berdasarkan peraturan tersebut, kedudukan, tugas dan fungsi Biro Perencanaan adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Kedudukan

Biro Perencanaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Biro Perencanaan dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan.

Dipindai dengan CamScanner

2. Tugas

   Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi kerja sama di lingkungan Basarnas.

3. Fungsi

   Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

   a. penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana kinerja dan anggaran di lingkungan Basarnas;
   b. penyiapan koordinasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Basarnas;
   c. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran Basarnas;
   d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan anggaran di lingkungan Basarnas;
   e. penyiapan penyusunan laporan rencana, program dan rencana anggaran di lingkungan Basarnas;
   f. penyiapan koordinasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri; dan
   g. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
   h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

4. Struktur Organisasi

   Struktur organisasi Biro Perencanaan mengalami penyederhanaan, yang semula Kepala Biro Perencanaan dalam level Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) didukung oleh 3 Jabatan Administrasi (Eselon III) dan 6 Jabatan Pengawas (Eselon IV), setelah penyederhanaan birokrasi Kepala Biro Perencanaan didukung Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan, yaitu:

   a. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rencana dan Program;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Evaluasi dan Pelaporan;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kerja Sama

Dipindai dengan CamScanner

Struktur organisasi Biro Perencanaan digambarkan sebagai berikut:



Struktur Organisasi Biro Perencanaan

C. PERMASALAHAN UTAMA

Beberapa permasalahan yang dihadapi Biro Perencanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Masih minimnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia di bidang perencanaan, terutama pada satuan kerja dan unit kerja.
2. Masih kurangnya budaya kerja dan *mindset* pegawai tentang perubahan dalam pekerjaan sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi, terkait pengalihan jabatan struktural ke fungsional.
3. Belum optimalnya sistem pelaporan dan evaluasi berbasis IT yang terpadu di lingkungan Basarnas.
4. Kurang intensnya koordinasi terkait usulan kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan dengan K/L atau organisasi serta negara tetangga.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mencakup tugas dan fungsi Biro Perencanaan selama periode tahun 2020-2024 yang memuat arah kebijakan dan strategis. Renstra Biro Perencanaan 2020-2024 selain dapat menjadi ukuran pencapaian kinerja Biro Perencanaan selama lima tahun juga dapat menjadi pedoman penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Biro Perencanan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing. Berikut visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Perencanaan 2020-2024.

1. Visi Biro Perencanaaan

   Secara berjenjang, visi Biro Perencanaan juga mengacu terhadap visi Lembaga dan visi Sekretariat Utama. Visi Biro Perencanaan periode tahun 2020-2024 yaitu: "**Terwujudnya Biro Perencanaan yang profesional dalam perencanaan anggaran, evaluasi dan pelaporan serta kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan dalam mendukung dalam mendukung visi Sekretaris Utama.**"

2. Misi Biro Perencanaan

   Untuk mencapai visinya, Biro Perencanaan menetapkan 3 misi :

   M.1 Menyelenggarakan peningkatan penyelenggaraan kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan.

   M.2 Menyelenggarakan peningkatan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

   M.3 Menyelenggarakan pelaksanaan perencanaan anggaran dan program kerja

Dipindai dengan CamScanner

3. Tujuan, Sasaran, Program Kerja dan Kegiatan Biro Perencanaan

Penjabaran pencapaian tujuan dan sasaran Biro Perencanaan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif yaitu *stakeholder perspective, costumer perspective, internal process perspective* dan *learning and growth perspective*, sasaran strategis Biro Perencanaan ahun 2020-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. *Stakeholder Perspective*

Dalam konteks ini, maka sasaran strategis (SS) Biro Perencanaan pada level *stakeholders perspectives* merepresentasikan pencapaian Tujuan Program (TP) dalam Rencana Strategis Basarnas Tahun 2020-2024 yang ditugaskan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kepada Sekretaris Utama untuk mewujudkannya, maka Tujuan Program (TP) terkait dengan program Dukungan Manajemen Basarnas adalah **TP5 Terwujudnya Regulasi dan Kelembagaan Yang Berkualitas.**

b. *Customer Perspective*

Dalam konteks ini, maka sasaran Program (SP) Biro Perencanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada level *Customers Perspectives* merepresentasikan pencapaian Sasaran Program (SP) Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 yang ditugaskan oleh Sekretaris Utama kepada Kepala Biro Perencanaan untuk mewujudkannya. Dalam hal ini, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024, maka Sasaran Program (SP) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan antara lain:

SP.11 Meningkatkan Kerjasama di Bidang Pencarian dan Pertolongan;

SP.12 Meningkatnya kualitas kelembagaan Basarnas.

c. *Internal Business Process*

Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Biro

Dipindai dengan CamScanner

Perencanaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan kegiatan Biro Perencanaan sesuai dengan struktur organisasi, sehingga dalam perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini ditetapkan sejumlah Sasaran Kegiatan (SK) yang menjadi tanggung jawab masing-masing Bagian di Lingkungan Biro Umum, *Internal Business Process* dapat dijabarkan sebagai berikut:

SK.1 Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan;

SK.2 Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan;

SK.3 Sasaran kegiatan ketiga: Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga;

Dari masing-masing Sasaran kegiatan (SK) didukung oleh Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagaimana terlampir.

d. *Learn* and Growth

Perspektif *Learning and Growth* (LGP) ini merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari Biro Umum Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini ditetapkan untuk perspektif *Learning and Growth* (LGP) antara lain: ASN yang profesional, Anggaran dan Teknologi informasi.

Dari keempat perspektif di atas, *Stakeholder Perspective* merupakan Sasaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, ***Customer Perspectives*** ini merupakan Sasaran Program (SP) Sekretariat Utama, *Internal Business Process Perspectives* merupakan Sasaran Kegiatan (SK) Biro Perencanaan, dan *Learning and Growth Perspective* merupakan masukan (*input*) untuk mencapai sasaran kegiatan

Tujuan Program (TP) terkait dengan program Dukungan Manajemen Basarnas untuk Biro Perencanaan adalah **TP5 Terwujudnya Regulasi dan Kelembagaan Yang Berkualitas**

Dipindai dengan CamScanner

Sasaran Program (SP.11) sebelas **Meningkatkan Kerjasama di Bidang Pencarian dan Pertolongan** didukung oleh 1 Sasaran Kegiatan yaitu: SK.1 Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan

Sasaran Program (SP.12) keduabelas, **Meningkatnya kualitas kelembagaan Basarnas** di dukung oleh 2 Sasaran Kegiatan yaitu:

SK.2 Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan;

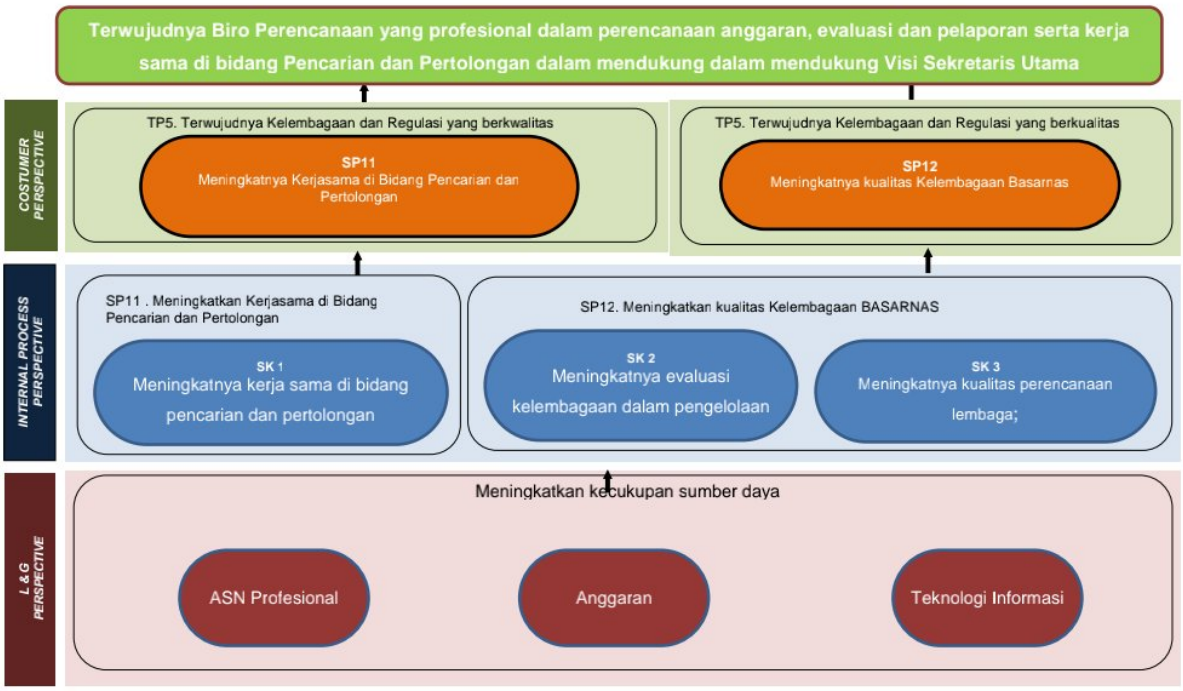
SK.3 Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga

Pada Gambar 2.1 dibawah merupakan *cascading* Peta Strategis Biro Perencanaan. Sasaran tersebut diturunkan secara berjenjang dan selaras dari Sasaran Program Sekretaris Utama, yang juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.



Dipindai dengan CamScanner

PETA STRATEGI BIRO PERENCANAN



Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan baik untuk Kerangka Kinerja maupun Kerangka Pendanaan telah tertuang di dalam Renstra Biro Perencanaan Tahun 2020-2024. Tabel berikut adalah Indikator Kinerja Biro Perencanaan, Definisi dan Rumus serta Program Kerja dan Anggaran yang akan dibahas selanjutnya dalam laporan kinerja ini.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kinerja dalam Renstra 2020-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Regulasi dan Kelembagaan Yang Berkualitas	SK.1. Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	1. Persentase tingkat kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase kerjasama luar negeri di bidang SAR yang bisa ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase kerjasama dalam negeri di bidang SAR yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%
	SK.2. Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuanga	4. Persentase satuan kerja yang menyampaikan dokumen SAKIP tepat waktu dan sesuai NSPK / persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada seluruh UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Persentase pemantauan pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	94.00	94.00	95.00	95.00	95.00
	SK.3. Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	7. Persentase pemenuhan target pendanaan sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%	100%	100%
		8. Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%	100%	100%	100%	100%

Dipindai dengan CamScanner

Pada Tahun 2021 Biro Perencanaan mereviu Indikator Kinerja dengan dasar :

1. Sesuai Surat dari Kementrian PANRB Nomor **B/22/M.AA.05/2021** tanggal **31 Maret 2021** tentang Rekomendasi Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020:
   a. menetapkan Indikator Kinerja Utama, baik untuk level Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Unit Kerja Eselon I, maupun Unit Kerja Mandiri di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
   b. melakukan perbaikan atas Indikator Kinerja pada Unit Kerja yang belum memnuhi kriteria Indikator Kinerja yang baik, maupun yang belum cukup untuk menggambarkan kinerja yang diharapkan pada Unit Kerja tersebut
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS
3. Adanya Peraturan Menteri PANRB Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Perubahan indikator dimaksud tidak merubah INDIKATOR KINERJA UTAMA LEMBAGA (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan). Perubahan terjadi di Unit Kerja Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis pada umumnya dan perubahan di Biro Perencanaan pada khususnya. Tujuan dan Sasaran Kegiatan masih sesuai dengan Renstra 2020 – 20204.

Perubahan Indikator pada Unit Kerja juga akan berdampak pada Perubahan Rencana Strategis Biro Perencanaan sehingga perlu dilakukan Reviu Renstra Biro Perencanaan 2020-2024

Dipindai dengan CamScanner

Reviu Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			
		SEMULA	MENJADI	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Regulasi dan Kelembagaan Yang Berkualitas	SK.1. Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	1. Persentase tingkat kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	1. Persentase kerja sama di bidang SAR	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase kerjasama luar negeri di bidang SAR yang bisa ditindaklanjuti	2. Persentase kerja sama di bidang SAR yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase kerjasama dalam negeri di bidang SAR yang dilaksanakan					
	SK.2. Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuanga	4. Persentase pemantauan pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	3. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	70	71	72	73
		5. Persentase satuan kerja yang menyampaikan dokumen SAKIP tepat waktu dan sesuai NSPK / persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada seluruh UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja	70,3	70,5	71,0	71,5
			5. Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	7,5	7,8	8,0	8,2
		6. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	6. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	94	94,5	94.8	95

Dipindai dengan CamScanner

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			
		SEMULA	MENJADI	2021	2022	2023	2024
	SK.3. Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	7. Persentase pemenuhan target pendanaan sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	7. Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	100%	100%	100%	100%
		8. Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	8. Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%	100%	100%	100%
			9. Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	100%	100%	100%	100%

Dipindai dengan CamScanner

Definisi dan Rumus Perhitungan Indikator Kinerja

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 11.1.1	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 11.1.1.a	Persentase kerja sama di bidang SAR	%	Mengukur persentase jumlah penyusunan dokumen kerja sama SAR dibandingkan dengan jumlah kerja sama SAR yang direncanakan. $\%= (\frac{Jumlah\ Dokumen\ Kerjasama\ SAR}{Jumlah\ Dokumen\ Kerja\ sama\ SAR\ \ yang\ direncanakan})x100$
		IKSK. 11.1.1.b	Persentase kerja sama di bidang SAR yang ditindaklanjuti	%	Mengukur Persentase jumlah perjanjian kerjasama yang ditindaklajuti dari perjanjian kerjasama yang sudah ada. $\%= (\frac{Jumlah\ Perjanjian\ Kerja\ Sama\ yang\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ Perjanjian\ Kerja\ Sama\ yang\ ada}) \times 100$
SK. 12.1.1	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	IKSK. 12.1.1.a	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur nilai evaluasi berdasarkan matriks penilaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT
		IKSK. 12.1.1.b	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian	Nilai	Mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja dari

Dipindai dengan CamScanner

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
			dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja		Kementerian PAN-RB
		IKSK. 12.1.1.c	Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	Nilai	Mengukur nilai penguatan akuntabilitas kinerja dalam Evaluasi RB yang dinilai oleh Kementerian PAN-RB
		IKSK. 12.1.1.d	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	%	Mengukur penilaian kinerja anggaran yang dinilai oleh DJA-Kemenkeu Berdasarkan hasil nilai kinerja anggaran
SK. 12.1.2	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	IKSK. 12.1.2.a	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	%	Mengukur persentase jumlah anggaran yang diblokir dalam DIPA $\% = (\frac{Jumlah\ anggaran\ yang\ diblokir}{Jumlah\ pagu\ anggaran\ pada\ DIPA}) \times 100$
		IKSK. 12.1.2.b	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	%	Mengukur persentase jumlah unit kerja yang tepat waktu dalam menyampaikan data usulan rencana dan program $\%= (\frac{Jumlah\ Unit\ kerja\ dan\ UPT\ yang\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ unit\ kerja\ dan\ UPT}) \times 100$

Dipindai dengan CamScanner

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
		IKSK. 12.1.2.c	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	%	Mengukur persentase kesesuaian anggaran yang di peroleh dengan anggaran yang direncanakan %= $(\frac{Jumlah\ anggaran\ yang\ diperoleh}{Jumlah\ seluruh\ unit\ kerja\ dan\ UPT})$ x 100

Kegiatan Biro Perencanaan pada Program Kerja Dukungan Manajemen

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN	VOLUME
1	Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	1. Persentase tingkat kerjasama di bidang SAR (Utama)	Penyusunan dokumen Kerja Sama SAR	1 Dok
			Penyusunan juknis tentang kerja sama SAR	1 Dok
		2. Persentase kerjasama di bidang SAR yang bisa ditindaklanjuti	Penyelenggaraan pertemuan kerja sama SAR luar negeri	1 Dok
			Workshop kerja sama SAR luar negeri	1 Dok
			Penyelenggaraan pertemuan kerja sama SAR dalam negeri	1 Dok

Dipindai dengan CamScanner

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN	VOLUME
			Workshop kerja sama SAR dalam negeri	1 Dok
2	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	3. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 4. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (SMART)	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan	1 Dok
			Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan	1 Dok
		5. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja 6. Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	Penyusunan LAKIP dan Laporan Kinerja	1 Dok
			Bimbingan Teknis penyusunan Laporan Kinerja	1 Dok
			Rapat Kerja Basarnas	1 Dok
3	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	7. Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV	Penyusunan Rencana Kerja	1 Dok

Dipindai dengan CamScanner

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN	VOLUME
		DIPA 8. Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program 9. Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	Penyusunan RKAKL Basarnas	1 Dok
			Sosialisasi penyusunan RKAKL	1 Dok
			Pembinaan Aparatur Perencanaan	1 Dok

Dipindai dengan CamScanner

Basarnas telah meredesain Sistem Perencanaan Penganggaran di tahun 2021. Manfaat redesain sistem perencanaan dan penganggaran yaitu:

1. Terwujudnya penjabaran yang logis dan jelas antara Program, Kegiatan, output, dan outcome
2. Terwujudnya sinergi antar Unit Kerja Eselon I dalam mencapai sasaran pembangunan
3. Terwujudnya efisiensi belanja Kementerian/Lembaga secara lebih optimal
4. Terwujudnya integrasi teknologi dan sistem informasi yang dapat mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional
5. Terwujudnya penataan organisasi yang dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja unit kerja di Kementerian Lembaga
6. Terwujudnya keterkaitan dan keselarasan antara Visi dan Misi Presiden dengan Fokus Pembangunan, 7 (tujuh) Agenda Pembangunan serta Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
7. Terciptanya rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, dan Keluaran (output) yang mencerminkan "*real work (eye catching*)"
8. Terwujudnya efisiensi dengan tidak adanya *overlapping* antar Kegiatan dan Output Program

Perubahan Program Basarnas

Semula	Menjadi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknıs Laınnya	Dukungan Manajemen
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Basarnas	
Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan	Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

Dipindai dengan CamScanner

Setelah merumuskan Redesain Program, pada Tahun 2021 Basarnas melakukan tindakan lebih lanjut yaitu:

1. Merumuskan nomenklatur sasaran (*outcome)* program,
2. Sasaran *(outcome)* program mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai secara nasional,
3. Merumuskan Indikantor Kinerja Utama Program,
4. Indikator kinerja program merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja program dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif,
5. Merumuskan nomenklatur output program,
6. *Output* program merupakan keluaran yang dihasilkan oleh K/L untuk terwujudnya *outcome*.

Penyusunan RO di Biro Perencanaan Basarnas

1. Tugas dan fungsi Biro Perencanaan serta tugas dan fungsi unit kerja pelaksana Kegiatan yang menghasilkan Keluaran (Output) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri terkait struktur organisasi dan tata kelola Kementerian/Lembaga
2. Peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Biro Perencanaan, peraturan lain terkait bidang/sektor/tema program yang diampu oleh Biro Perencanaan.

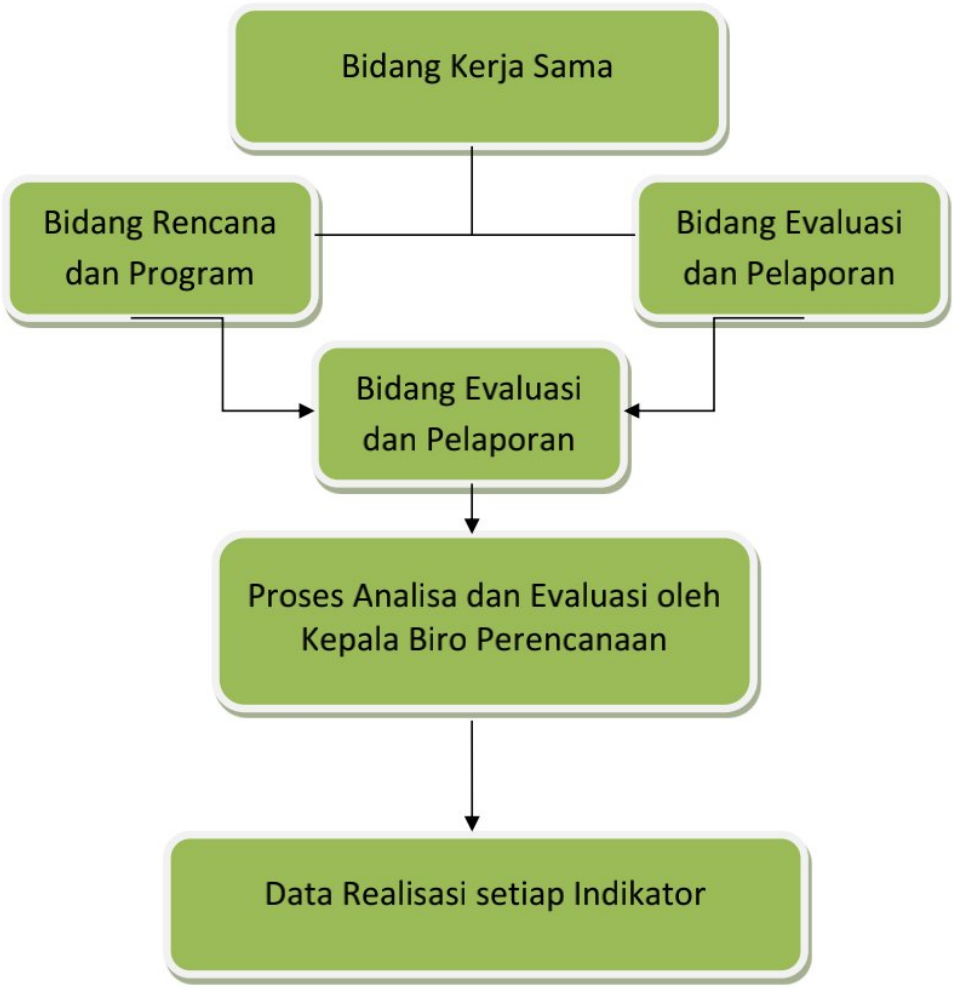
KRO Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Kegiatan	Semula (Output)	Menjadi (KRO)
Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Layanan Perencanaan (952)	Layanan Perencanaan dan Penganggaran internal (EAB)
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (953)	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (EAL)
	Layanan Kerja Sama (101)	Kerja Sama (AEC)
	Layanan Dukungan Manajemen Satker (970)	

Dipindai dengan CamScanner

4. Prosedur Pengumpulan Data

Pencatatan dan pengumpulan data diperoleh dari masing-masing bidang di lingkungan Biro Perencanaan yaitu bidang kerja sama, bidang rencana dan program, serta bidang evaluasi dan pelaporan. Data-data tersebut kemudian dianalisa dan dievaluasi sehingga didapatkan data realisasi dari indikator yang telah ditetapkan. Prosedur pengumpulan data dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Prosedur Pengumpulan Data

Sesuai dengan rekomendasi Kementerian PANRB pada tahun 2019 Basarnas telah membuat aplikasi e-*Performance*, dimana nantinya data-data Indikator Kinerja tertuang di dalam aplikasi dan pemantauannya serta pengendaliannya dilaksanakan setiap bulannya.

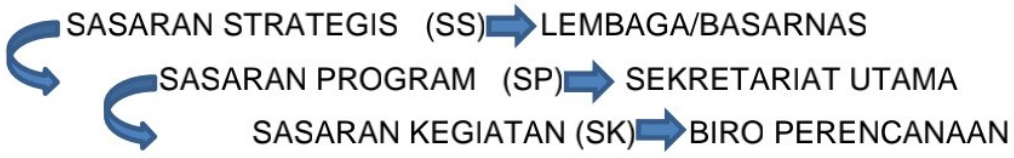
Dipindai dengan CamScanner

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja dalam pelaksanaan tugas yang tertuang dalam Penetapan Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



Perjanjian Kinerja untuk pejabat dibawah Kepala Biro Perencanaan ini disusun secara berjenjang dan selaras dengan menggunakan *Balance Score Card* (Peta Strategis dan Pohon Kinerja) yang tertuang dalam Renstra Biro Perencanaan.



Gambar 2.3 Cascading Sasaran

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan TA. 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase tingkat kerja sama di bidang SAR	100%
	Persentase kerja sama luar negeri di bidang SAR yang ditindaklanjuti	100%
Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	70
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja	70,3
	Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	7,5
	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	94
Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	100%
	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%
	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	100%

Pada awal tahun Anggaran 2021, Biro Perencanaan mendapatkan Pagu awal sebesar Rp. 10.517.363.000,- yang terdiri dari :

a. KRO-RO Kerjasama dalam dan Luar Negri Rp. 3.700.000.000,-
b. KRO-RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Rp. 3.417.363.000,-
c. KRO-RO Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Rp. 3.400.000.000,-

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada TA 2021. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA

Tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis diukur dari capaian kinerja suatu organisasi. Capaian kinerja organisasi dihitung berdasarkan keberhasilan Biro Perencanaan dalam merealisasikan Indikator Kinerja dari target yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dari pencapaian Indikator Kinerja tersebut difokuskan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, sedangkan Indikator Kinerja lainnya merupakan pendukung dari tercapainya IKU tersebut.

Secara garis besar rata-rata capaian kinerja pada IKU Biro Perencanaan sebesar 100,22%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut:

Capaian Kinerja Biro Perencanaan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SK.1. Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	1. Persentase kerja sama di bidang SAR	100%	100%	100%
	2. Persentase kerja sama di bidang SAR yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
SK.2. Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan	3. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	70	71,84	102,30%

Dipindai dengan CamScanner

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
keuangan	4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja	70,3	65,15	92,67%
	5. Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	7,5	7,98	105,20%
	6. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	94	93,8	99,79%
SK.3. Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	7. Persentase anggaran yang tidak tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	98%	99,99%	102,03%
	8. Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%	100%	100%
	9. Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	100%	100%	100%
RATA RATA CAPAIAN				100,22%

B. PENGUKURAN KINERJA

Secara umum terdapat 3 (tiga) Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan yang merupakan turunan Sasaran Sekretaris Utama. Penjelasan terkait target kinerja, realisasi dan capaian untuk masing masing Sasaran Kegiatan yang ada di Biro Perencanaan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan”
   a. Capaian

      Sasaran ini didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu Persentase kerja sama di bidang SAR dan Persentase kerja sama di bidang SAR yang ditindaklanjuti. Adapun capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Dipindai dengan CamScanner

Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SK.1. Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	1. Persentase kerja sama di bidang SAR	100%	100%	100%
	2. Persentase kerja sama di bidang SAR yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tesebut adalah sebagai berikut:

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang pencarian dan pertolongan dan/atau warga negara asing untuk menunjang tugas dan fungsinya. Sejalan dengan hal tersebut, Basarnas mempunyai tugas dalam penyiapan koordinasi kerja sama dan bantuan luar negeri, penyusunan kerja sama dan bantuan luar negeri serta penyusunan laporan rencana dan program kerja sama dan bantuan luar negeri. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama teknis operasional dan bantuan luar negeri melalui kerja sama secara bilateral, regional maupun multilateral.

Pelaksanaan kerja sama dalam negeri tersebut diawali dengan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). MoU adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. MoU bisa juga disebut sebagai perjanjian pendahuluan yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Selanjutnya masing-masing instansi mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing yang kemudian diperkuat dengan Perjanjian Kerja Sama.

Berikut koordinasi dan kerja sama yang telah dilaksanakan Basarnas pada Tahun 2021:

Dipindai dengan CamScanner

1) Kerja Sama Luar Negeri

Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, guna menunjang tugas dan fungsinya Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang SAR dan/atau negara asing. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama bilateral, regional maupun multilateral.

a) Kerja Sama Bilateral

Basarnas telah membuat naskah kerja sama dengan berbagai otoritas SAR negara-negara lain dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *SAR arrangement*. Kerja sama tersebut antara lain dilaksanakan dengan, Australia, Timor Leste, Papua Nugini, Sri Lanka, RRT, Korea, dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2020-2021 dilaksanakan kegiatan kerja sama sebagaimana penjelasan di bawah ini.

- Kerja Sama Indonesia-Australia

  Kerja sama Indonesia-Australia dilaksanakan dalam kerangka kerja sama Indonesia *Transport Safety Assistance Package* (ITSAP). ITSAP adalah paket bantuan dari Australia untuk meningkatkan keselamatan transportasi di Indonesia yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2008. Dasar kerja sama ini adalah MoU bidang transportasi yang ditandatangani oleh Menteri Transportasi kedua negara. Paket bantuan ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keselamatan transportasi. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah *Intensive English Cours.*

b) Kerja Sama Regional

- ASEAN *Transport SAR Forum ke-8*

  ASEAN *Transport SAR Forum* (ATSF) merupakan forum otoritas SAR penerbangan dan pelayaran di ASEAN yang dibentuk sebagai tindak lanjut pertemuan ASEAN *SAR Expert Group Meeting* di Yangoon, Myanmar pada tanggal

Dipindai dengan CamScanner

16-17 Oktober 2012. Forum ini diprakarsai oleh Basarnas. Dalam pertemuan tersebut para menteri transportasi ASEAN bersepakat untuk mengintensifkan kerja sama SAR untuk mendukung sektor transportasi. Forum ini menyelenggarakan pertemuan secara berkala setiap tahun bertempat di negara yang menjadi Sekretaris ASEAN. Kegiatan yang dilaksanakan pada forum ini antara lain adalah pertemuan tahunan ATSF, penyusunan *ASEAN Agreement on Aeronautical and Maritime Search and Rescue*, penyusunan *Search and Rescue Operational Procedure*, latihan bersama ATSF yang sementara ini dilaksanakan dalam bentuk latihan posko dan pelatihan SAR.

Pertemuan ATSF ke-8 ini dilaksanakan secara *virtual* pada tanggal 22 Juli 2021 mengingat keadaan pandemi akibat wabah Covid-19 dengan Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan.

- IORA *(Indian Ocean Rim Association)*

  IORA adalah organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di wilayah Samudera Hindia. Organisasi ini dibentuk karena melihat adanya berbagai tantangan di kawasan Samudera Hindia, maka diperlukan kerja sama untuk menjaga stabilitas keamanan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi (perdagangan dan investasi). Nilai penting organisasi ini bagi Indonesia adalah:

  ✓ Memperluas pengaruh dan memperkuat posisi tawar Indonesia di kawasan Samudera Hindia sebagai *new growth center* di kawasan.

  ✓ Mengatasi berbagai tantangan yang muncul di Samudera Hindia seperti *maritime safety and security*, *illicit drug trafficking*, *people smuggling*, *Illegal*

Dipindai dengan CamScanner

Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, piracy, economic growth, dan *climate change.*

- ✓ Merupakan organisasi kerja sama maritim yang komprehensif guna mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sesuai visi Nawa Cita Presiden RI.
- ✓ Indonesia menjadi ketua Indian Ocean Rim Association (IORA) untuk periode 2015-2017

2) Kerja Sama Dalam Negeri

Dalam rangka penyelenggaraan SAR Basarnas melakukan kerja sama dengan berbagai pihak di dalam negeri yang antara lain terdiri dari TNI, POLRI, kementerian dan Lembaga terkait, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan perorangan. Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi dengan rincian sebagaimana di bawah ini. Berikut kerja sama dalam negeri yang telah dilaksanakan Basarnas Tahun Anggaran 2021:

No	Kerja Sama	Tanggal
1.	Dengan Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pelaut	3 Februari 2021 s.d. 3 Februari 2021
2.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung dengan RAPI Daerah 08 Lampung tentang Penyiagaan Sistem Jaringan Komunikasi Darurat untuk Mendukung Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	24 Maret 2021 s.d. 24 Maret 2026
3.	Dengan Kawanua Rescue Indonesia tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	27 Maret 2021 s.d. 27 Maret 2026
4.	Dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan serta Peningkatan Pelayanan di Jalan Tol	16 April 2021 s.d. 16 April 2022
5.	Dengan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2021 Papua tentang Dukungan Siaga Pencarian dan Pertolongan Khusus Dalam Rangka Antisipasi Evakuasi Medis Udara Pada Pelaksanaan PON XX Tahun 2021 di Jayapura Provinsi Papua	30 Juli 2021 s.d. 30 Juli 2026
6.	Dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	27 September 2021 s.d. 27 September 2026
7.	Dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tentang Penyelenggaraan Beasiswa	21 Oktober 2021 s.d.

Dipindai dengan CamScanner

No	Kerja Sama	Tanggal
	Pendidikan Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	31 Juli 2023
8.	Dengan Sentra Komunikasi Mitra POLRI tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	16 Desember 2021 s.d. 16 Desember 2026
9.	Dengan Yayasan Rumah Zakat Indonesia tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	28 Desember 2021 s.d. 28 Desember 2026

3) Kegiatan dukungan kerja sama luar negeri

Sebagai otoritas SAR di Indonesia, Basarnas berperan aktif mengikuti kegiatan organisasi-organisasi internasional terkait di bidang penerbangan, pelayaran, pemanfaatan satelit SAR dan *urban* SAR. Dukungan-dukungan dari instansi maupun lembaga luar negeri berupa kegiatan-kegiatan dan kerja sama sangat mempengaruhi dalam keberhasilan pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan. Kegiatan kerja sama Basarnas pada organisasi-organisasi tersebut adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

a) *International Civil Aviation Organization* (ICAO)

Kegiatan Basarnas dalam otoritas ini untuk mendukung Indonesia sebagai anggota ICAO dengan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai instansi penjuru. Kegiatan yang dilaksanakan Basarnas antara lain berupa:

- Tahun 2021 pertemuan ICAO yang dihadiri oleh perwakilan Basarnas secara *virtual* antara lain adalah:

No.	Pertemuan	Tanggal
1.	*The Sixth Meeting of the Asia/Pacific Regional Search and rescue Work Group* (APSAR/WG/6)	3 s.d 5 Mei 2021

Dipindai dengan CamScanner

- Sesuai dengan pelaksanaan *The Sixth Meeting of The Asia/Pacific Regional Search and Rescue Work Group (APSAR/WG/6)* dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

  ✓ *The Sixth Meeting of The Asia/Pacific Regional Search and Rescue Work Group (APSAR/WG/6)* telah terselenggara dengan baik dan lancar sesuai dengan agenda item yang ditentukan. Rapat diikuti sebanyak 112 peserta yang berasal dari 27 negara, dan 3 organisasi internasional;

  ✓ Implementasi *Autonomous Distress Tracking* (ADT) berlaku pada 1 Januari 2023. Implementasi ini memerlukan waktu untuk memastikan SOP koordinasi ketika terjadi *real distress* antara *Aeronautical RCC*, *Maritime RCC*, dan *Joint Rescue Coordination Centre*. ADT pada saat aktivasi dapat melintasi beberapa *Flight Information Region* (FIR) dan *Search and Rescue Region* (SRR).

  ✓ Peningkatan *system operation* dari *Cospas-Sarsat* ke depan berfokus pada penyempurnaan dan peningkatan spesifikasi teknis dari fasilitas *MEOSAR Satellite, Emergency Locator Transmitter – Distress Tracking* (ELT-DT), dan *Return Link Services* (RLS).

  ✓ Rata-rata tingkat *false alert* dari *distress beacon* di tahun 2019 mencapai 96.65% yang berarti hanya 1 *real distress* diterima dari 30 peringatan marabahaya. Di Indonesia tercatat tingkat *false alert rate* dari EPIRB lebih besar atau sama dengan 5%.

  ✓ Pelaksanaan test komunikasi antar IDMCC dengan RCC Timor Leste sebagai *SAR Point of Contact* (SPOC) berjalan lancar sesuai tindak lanjut MOU antara *National SAR Agency of Republic of Indonesia dan The Ministry of Transport and Communication the*

Dipindai dengan CamScanner

Democratic Republic of Timor-Leste on Search and Rescue Cooperation.

- ✓ Negara-negara anggota ICAO diharapkan dapat menyampaikan batas *Search and Rescue Region* (SRR) kepada ICAO paling lambat di bulan Oktober 2021;
- ✓ Ketentuan perlunya MOU antara otoritas SAR dengan otoritas investigasi kecelakaan transportasi yang akan dicantumkan dan diperbaharui di dalam IAMSAR Manual. MOU ini dibuat untuk memperjelas batas kewenangan antara SAR dan investigasi kecelakaan transportasi yang tertuang di dalam *Annex* 12 tentang *Search and Rescue* dan *Annex* 13 tentang *Accident Investigation*.

b. Analisis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Dipindai dengan CamScanner

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7) Analisis program/kegiatan yan menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Penjabaran dari masing-masing analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase kerja sama di bidang SAR	100%	100%	100%
	Persentase kerja sama di bidang SAR yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan telah mencapai target.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase kerja sama di bidang SAR	2019	100%	100%	100%
	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
Persentase kerja sama di bidang SAR yang ditindaklanjuti	2019	100%	100%	100%
	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator-indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan telah mencapai targetnya serta tidak mengalami penurunan maupun kenaikan.

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase kerja sama di bidang SAR	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	-	-
	2023	100%	-	-

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	2024	100%	-	-
Persentase kerja sama di bidang SAR yang ditindaklanjuti	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	-	-
	2023	100%	-	-
	2024	100%	-	-

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Untuk indikator-indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan tidak ada standar nasional.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Untuk pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan untuk Tahun 2021 target telah tercapai. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:

- Adanya koordinasi Basarnas dengan organisasi atau instansi lain baik dalam maupun luar negeri sehingga tercapai kerja sama yang baik
- Peran aktif Basarnas dalam kegiatan luar negeri di bidang pencarian dan pertolongan

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2021 Biro Perencanaan telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
- Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu Kementerian/Lembaga.
- Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dipindai dengan CamScanner

- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik.

7) Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan adalah sebagai berikut:

- Penyusunan dokumen Kerja Sama SAR
- Penyelenggaraan pertemuan kerja sama SAR luar negeri
- Penyelenggaraan pertemuan kerja sama SAR dalam negeri
- Workshop kerja sama SAR dalam negeri
- Penyusunan Juknis tentang Kerja sama SAR
- Penyelenggaraan Regional Meeting (INSARAG)
- Workshop Kerja Sama SAR Luar Negeri

2. Sasaran kedua yaitu "Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan"

a. Capaian

Sasaran ini didukung oleh 4 indikator kinerja, yaitu Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja, Nilai penguatan akuntabilitas kinerja, serta ilai atas evaluasi kinerja anggaran. Adapun capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK.2)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan	70	71,84	102,30%

Dipindai dengan CamScanner

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
kinerja dan keuangan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja	70,3	65,15	92,67%
	Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	7,5	7,98	105,20%
	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	94	93,8	99,79%

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan" didukung oleh Indikator Kinerja sebagai berikut:

1) Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

   Pengukuran indikator ini dihitung dari rata-rata hasil penilaian kinerja UPT Kategori Perencanaan dan Evaluasi. Penilaian kinerja UPT untuk kategori tersebut terdiri dari:

   a) Penilaian dokumen SAKIP dan aplikasi pemantauan kinerja
      - Dokumen Renstra
      - Dokumen Perjanjian Kinerja
      - Dokumen Rencana Aksi
      - Laporan Kinerja
      - Aplikasi Simonev/Laporan Bulanan
      - Aplikasi *e-Performance*
      - Aplikasi Smart-DJA
      - Aplikasi eMonev Bappenas
   b) Penilaian pengajuan RKA-KL
      - Kesesuaian pengusulan anggaran dengan Renstra UPT

Dipindai dengan CamScanner

- Ketepatan waktu pengajuan RKA-KL
- Kelengkapan TOR, RAB dan data dukung

Berikut rekap hasil penilaian kinerja UPT untuk Kategori Perencanaan dan Evaluasi:

No.	UPT Kelas A	Evalap		Renprog		Nilai Akhir
		Nilai	65%	Nilai	35%	
Kelas A						
1	Balai Diklat	62.12	40.38	69.00	24.15	64.53
2	Banda Aceh	83.16	54.05	69.00	24.15	78.20
3	Medan	80.90	52.59	69.00	24.15	76.74
4	Padang	79.92	51.95	69.00	24.15	76.10
5	Pekanbaru	84.17	54.71	69.00	24.15	78.86
6	Tanjung Pinang	76.48	49.71	69.00	24.15	73.86
7	Lampung	78.54	51.05	69.00	24.15	75.20
8	Jakarta	79.98	51.99	69.00	24.15	76.14
9	Bandung	83.16	54.05	69.00	24.15	78.20
10	Semarang	84.48	54.91	69.00	24.15	79.06
11	Surabaya	75.72	49.22	69.00	24.15	73.37
12	Denpasar	82.88	53.87	70.00	24.50	78.37
13	Mataram	59.00	38.35	69.00	24.15	62.50
14	Kupang	83.62	54.35	69.00	24.15	78.50
15	Balikpapan	80.01	52.01	65.00	22.75	74.76
16	Pontianak	80.55	52.36	70.00	24.50	76.86
17	Makassar	84.30	54.80	69.00	24.15	78.95
18	Kendari	73.97	48.08	65.00	22.75	70.83
19	Manado	79.33	51.56	69.00	24.15	75.71
20	Ambon	68.43	44.48	69.00	24.15	68.63
21	Biak	72.25	46.96	69.00	24.15	71.11
22	Sorong	46.58	30.28	69.00	24.15	54.43
23	Jayapura	71.57	46.52	70.00	24.50	71.02
Kelas B						
1	Nias	61.50	39.98	69.00	24.15	64.13
2	Mentawai	73.99	48.09	69.00	24.15	72.24
3	Jambi	79.35	51.58	69.00	24.15	75.73
4	Natuna	76.12	49.48	69.00	24.15	73.63
5	Pangkalpinang	81.61	53.05	70.00	24.50	77.55
6	Palembang	84.02	54.61	69.00	24.15	78.76
7	Bengkulu	82.06	53.34	70.00	24.50	77.84
8	Banten	81.31	52.85	69.00	24.15	77.00
9	Cilacap	69.56	45.21	69.00	24.15	69.36
10	Yogyakarta	74.74	48.58	69.00	24.15	72.73
11	Banjarmasin	80.01	52.01	69.00	24.15	76.16
12	Palangkaraya	74.43	48.38	69.00	24.15	72.53
13	Tarakan	77.63	50.46	69.00	24.15	74.61
14	Maumere	75.70	49.21	69.00	24.15	73.36

Dipindai dengan CamScanner

No.	UPT Kelas A	Evalap		Renprog		Nilai Akhir
		Nilai	65%	Nilai	35%	
15	Mamuju	56.21	36.54	69.00	24.15	60.69
16	Gorontalo	63.20	41.08	69.00	24.15	65.23
17	Palu	57.19	37.17	69.00	24.15	61.32
18	Ternate	51.19	33.27	69.00	24.15	57.42
19	Manokwari	66.20	43.03	69.00	24.15	67.18
20	Timika	50.17	32.61	69.00	24.15	56.76
21	Merauke	62.22	40.44	69.00	24.15	64.59

2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja.
Pengukuran indikator kinerja ini merupakan hasil evaluasi SAKIP Basarnas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang meliputi aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja.

Adapun hasil penilaian SAKIP Tahun 2020 yang dilaksanakan pada Tahun 2021 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mencakup aspek dimaksud adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,81
b.	Pengukurun Kinerja	25	16,49
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,66
d.	Capaian Kinerja	20	16,19
	Nilai Hasil Evaluasi	90	65,15

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Laporan SAKIP terdiri atas dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian.
Penyampaian dokumen SAKIP tepat waktu harus sesuai dengan Norma, Strandar, Prosedur, dan Ketentuan (NSPK) yang berlaku. Dasar hukum penyusunan SAKIP diantaranya:

Dipindai dengan CamScanner

a) Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja;
b) Peraturan Kementerian PANRB No 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Kinerja
c) Peraturan Menteri PPN No 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
d) Peraturan Kementerian PANRB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
e) Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No 4 Tahun 2016 tentang Implementasi Sistem SAKIP di Lingkungan Badan SAR Nasional.

Dokumen SAKIP yang disusun harus di sampaikan ke Kementerian PANRB melalui aplikasi e-SAKIP REVIU (esr.menpan.go.id). Dokumen SAKIP tersebut diantaranya yaitu:

a) Indikator Kinerja Utama
b) Reviu Rencana Strategis
c) Rancangan Rencana Strategis 2020-2024
d) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP)
e) Perjanjian Kinerja Tahunan
f) Rencana Kinerja Tahunan
g) Rencana Aksi

3) Nilai penguatan akuntabilitas kinerja

Pengukuran indikator ini merupakan bagian dari penilaian Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melaksanakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Basarnas telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2015. Dalam periode ini (2020-2024) pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Basarnas bertekad untuk

Dipindai dengan CamScanner

menyempurnakan dan meningkatan kualitas Reformasi Birokrasi di lingkungan Basarnas, yang antara lain diwujudkan dengan menyusun Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 untuk memberikan pedoman dalam implementasi program reformasi birokrasi di lingkungan Basarnas, pembentukan *Agent of Change* dan pemilihan program *Quick Wins* tepat sasaran.

Sesuai dengan Surat Menteri PANRB Nomor: B/19/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Basarnas Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB pada Tahun 2021 mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 76,85 dengan kategori BB. Berikut adalah rincian nilai indeks reformasi birokrasi tersebut.

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	2020
A	Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	16,98
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,14
	III. Reform	30,00	20,43
Sub Total Komponen Pengungkit		60,00	43,55
B	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,98
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,68
3	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,35
4	Kinerja Organisasi	10,00	7,29
Sub Total Komponen Hasil		40,00	33,30
Indeks Reformasi Birokrasi		100,00	76,85

4) Indikator Nilai atas Evaluasi Kinerja Anggaran

Pengukuran indikator kinerja ini merupakan nilai capaian pada aplikasi SMART. Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi tersebut terintegrasi

Dipindai dengan CamScanner

dengan aplikasi keuangan lainnya dan menyajikan informasi-informasi terkait realisasi anggaran, keluaran, capaiam indikator keluaran, serta capaian indikator sasaran.

Pengisian aplikasi SMART-DJA dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja, tingkat unit eselon 1 sampai dengan tingkat lembaga. Selain itu aplikasi tersebut diisi secara berkala yaitu setiap bulan. Sehingga dari aplikasi tersebut DJA Kementerian Keuangan dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran dari tiap-tiap kementerian dan lembaga.

Terkait Pemantauan pencapaian Indikator Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (SMART), Biro Perencanaan telah melaksanakan Pemantauan terhadap seluruh UPT dan Unit Kerja di kantor Pusat, baik pemantauan di Aplikasi, melalui *Virtual Meeting* maupun Monitoring langsung pada beberapa Kantor Unit Pelayanan Teknis sebagai uji petik. Berikut ini hasil nilai kinerja pada aplikasi SMART Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021.



Dipindai dengan CamScanner

c. Analisis

Penjabaran dari masing-masing analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	70	71,84	102,30%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja	70,3	65,15	92,67%
	Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	7,5	7,98	105,20%
	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	94	93,8	99,79%

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan:

a) Indikator Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan capaiannya sebesar 102,30% dengan realisasi sebesar 71,84 dari target 70;
b) Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja capaiannya sebesar 92,67% dengan realisasi sebesar 65,15 dari target 70,3;
c) Indikator Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja capaiannya sebesar 105,20% dengan realisasi sebesar 7,98 dari target 7,5;

Dipindai dengan CamScanner

d) Indikator Nilai atas Evaluasi Kinerja Anggaran capaiannya sebesar 99,79% dengan realisasi sebesar 93,8 dari target 94.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2019	NA	NA	NA
	2020	NA	NA	NA
	2021	70	71,84	102,30%
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja	2019	70,3	62,51	88,91%
	2020	70,3	64,34	91,52
	2021	70,3	65,15	92,67%
Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	2019	7,5	9,53	127,06
	2020	7,5	9,68	129,06
	2021	7,5	7,98	105,20%
Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	2020	94	94,82	100,87%
	2021	94	93,8	99,79%

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator-indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan:

a) Indikator Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak ada pembanding tahun sebelumnya.
b) Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2019 dan 2020.
c) Indikator Nilai penguatan akuntabilitas kinerja capaiannya mengalami penurunan apabila dibandingan dengan capaian Tahun 2019 dan 2020.

Dipindai dengan CamScanner

d) Indikator Nilai atas evaluasi kinerja anggaran capaiannya mengalami penurunan dari 100,87% pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar 94,82 dari target sebesar 94, menjadi 99,79% dengan realisasi sebesar 93,8 dari target sebesar 94.

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2020	NA	NA	NA
	2021	70	71,84	102,30%
	2022	71		
	2023	72		
	2024	73		
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja	2020	70,3	64,34	91,52
	2021	70,3	65,15	92,67%
	2022	70,5		
	2023	71,0		
	2024	71,5		
Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	2020	7,5	9,68	129,06
	2021	7,5	7,98	105,20%
	2022	7,8		
	2023	8,0		
	2024	8,2		
Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	2020	94		
	2021	94	93,8	99,79%
	2022	94,5	-	-
	2023	94,8	-	-
	2024	95	-	-

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Untuk indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan tidak ada standar nasional.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
Untuk pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan untuk

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2021 ada yang mengalami penurunan dan kenaikan. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:

- Adanya sosialisasi pengisian aplikasi pemantauan kinerja yang merupakan salah satu kategori penilaian UPT.
- Adanya asistensi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait dengan penyusunan dokumen SAKIP.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2021 Biro Perencanaan telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
- Pembinaan sumber daya manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu Kementerian/Lembaga.
- Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas.
- Mengoptimalkan sumber daya manusia.
- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik.

7) Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan adalah sebagai berikut:

- Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
- Rapat Kerja Basarnas
- Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja
- Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja
- Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan

3. Sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga”
   a. Capaian

Dipindai dengan CamScanner

Sasaran ini didukung oleh 3 indikator kinerja, yaitu Persentase anggaran yang tidak tercantum dalam catatan halaman IV DIPA, Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program, serta Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting. Adapun capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK3)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang tidak tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	98%	99,99%	102,03%
	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%	100%	100%
	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	100%	100%	100%

Dalam rangka mendukung sasaran di atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Bagian Rencana dan Program beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Indikator Persentase anggaran yang tidak tercantum dalam catatan halaman IV DIPA

   Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dipindai dengan CamScanner

Penyusunan rencana kerja yang baik dan benar dengan mengacu kepada arah kebijakan dan direktif presiden melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional diharapkan dapat meminimalisir blokir anggaran. Pemblokiran anggaran menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran. Beberapa penyebab anggaran masuk dalam Catatan Halaman IV DIPA atau dibintangi akibat kesalahan dalam perencanaan, antara lain data dukung yang kurang lengkap, proporsi anggaran yang kurang tepat, penelahaan dilakukan secara on-line dan waktu yang singkat, mengakibatkan penjelasan pada waktu pendalaman terhadap kegiatan-kegiatan yang disampaikan belum maksimal. Tujuan dari pengukuran indikator ini yaitu Untuk mengetahui sejauh mana unit kerja dan UPT menerapkan peraturan terkait pengusulan anggaran unit kerja dan UPT antara lain berupa kelengkapan data dukung dan dokumen lain yang diperlukan dalam pengusulan anggaran.

Pada penyusunan rencana kerja Tahun 2022 yang dilaksanakan pada Tahun 2021 anggaran yang diblokir adalah pengadaan kendaraan roda 2 Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang sebesar Rp. 64.438.000,- dari anggaran total Basarnas sebesar Rp. 1.967.176.959.000,-. Hal tersebut dikarenakan usulan pengadaan belum dilengkapi dengan dokumen RKBMN pengadaan roda 2.

2) Indikator Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program

Penyusunan RKA-KL dimulai dengan penyusunan Pagu Kebutuhan, yang merupakan penggambaran kebutuhan anggaran dari masing-masing UPT dan digabungkan oleh Biro Perencanaan mengacu pada Renstra dan RKP. Kemudian dilanjutkan dengan Pagu Indikatif yang merupakan indikasi awal kebutuhan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dan target kinerja yang akan dicapai ditahun yang akan datang. Setelah itu akan diadakan *Trilateral Meeting* antara Kemenkeu, Bappenas dan Basarnas untuk

Dipindai dengan CamScanner

membahas komposisi antar program, kegiatan dan belanja yang selaras dengan RPJM, Renstra dan RKP.

Selanjutnya disusun Pagu Anggaran yang merupakan rincian anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/ atau pembiayaan anggaran dalam APBN. Sebelum dikeluarkan Pagu Alokasi Anggaran maka dilakukan Trilateral Meeting kedua untuk memastikan anggaran yang diberikan mempunyai komposisi yang pas dalam membiayai kegiatan pemerintah. Pagu Alokasi Anggaran merupakan kegiatan akhir dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL). Pagu Alokasi Anggaran merupakan acuan dalam penyusunan APBN di tahun yang akan datang.

Penyusunan RKA-KL diselaraskan dengan jadual dari Kementerian Keuangan dan Bappenas. Pelaksanaannya dari tahun ke tahun bervariasi tergantung dari kondisi negara. Secara umum Pagu Kebutuhan dilaksakanan bulan Februari Maret, Pagu Indikatif bulan Maret-April, Pagu Anggaran bulan-Juli, dan Pagu Alokasi Anggaran bulan September-Oktober

Adanya Dateline dan terkait Anggaran membutuhkan ketepatan waktu dari UPT dan Unit Kerja Kantor Pusat untuk menyusun dengan cermat. Dari hasil kegiatan Tahun 2021, semua satker melaksanakan secara tepat waktu.

3) Indikator Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting

Dalam proses perencanaan kegiatan dan anggaran harus melalui kegiatan Trilateral Meeting. Trilateral Meeting atau pertemuan tiga pihak adalah forum untuk mengsinergikan dan mengkonsolidasikan rencana prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam RKP dengan rencana program dan kegiatan K/L yang dituangkan dalam Renja K/L yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA K/L dan APBN. Trilateral Meeting tersebut dihadiri oleh Basarnas, Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Pada pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran Basarnas Tahun 2022 yang dilaksanakan pada Tahun 2021, dihasilkan

Dipindai dengan CamScanner

kegiatan dan anggaran khususnya rencana prorgam dan kegiatan prioritas yang sesuai dengan hasil pembahasan pada kegiatan trilateral meeting.

b. Analisis

Penjabaran dari masing-masing analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang tidak tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	98%	99,99%	102,03%
	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%	100%	100%
	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	100%	100%	100%

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator-indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga telah mencapai targetnya.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase anggaran yang tidak tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	2020	98%	100%	102,04%
	2021	98%	99,99%	102,03%
Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	2019	100%	100%	100%
	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	2019	100%	100%	100%
	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%

Dipindai dengan CamScanner

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator-indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan:

a) Capaian Indikator Persentase anggaran yang tidak tercantum dalam catatan halaman IV DIPA pada Tahun 2021 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2020.
b) Indikator Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program target tercapai baik Tahun 2021 maupun tahun sebelumnya.
c) Indikator Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting target tercapai baik Tahun 2021 maupun tahun sebelumnya.

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase anggaran yang tidak tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	2020	98%	100%	102,04%
	2021	98%	99,99%	102,03%
	2022	98%		
	2023	98%		
	2024	98%		
Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%		
	2023	100%		
	2024	100%		
Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%		
	2023	100%		
	2024	100%		

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Untuk indikator-indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga tidak ada standar nasional.

Dipindai dengan CamScanner

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Untuk pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga untuk Tahun 2021 relatif realisasinya memenuhi target. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:

- dilaksanakan asistensi dan pendampingan dalam rangka pengajuan RKA-KL
- dilaksanakan sosialisasi terkait pengisian aplikasi RKA-KL

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2021 Biro Perencanaan telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
- Pembinaan sumber daya manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu Kementerian/Lembaga.
- Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas.
- Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada.
- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik.

7) Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga adalah sebagai berikut:

- Penyusunan RKAKL Basarnas
- Rapat Koordinasi Perencanaan Basarnas

Dipindai dengan CamScanner

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mencapai sasaran Biro Perencanaan, pada Tahun Anggaran 2021 telah dianggarkan pendanaan APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 8,424,685,000,-. Namun pada tahun berjalan terkena refocusing anggaran sehingga sisa anggaran sebesar Rp 4,686,735,000,-, telah terrealisasi sebesar Rp 4,655,165,444,-. (99,32%), rinciannya adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Pagu Revisi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase kerja sama di bidang SAR	Penyusunan dokumen Kerja Sama SAR	293,210,000	291,073,640
		Penyelenggaraan pertemuan kerja sama SAR luar negeri	86,610,000	86,509,900
		Penyelenggaraan pertemuan kerja sama SAR dalam negeri	194,387,000	193,577,115
		Workshop kerja sama SAR dalam negeri	283,104,000	280,733,920
		Penyusunan Juknis tentang Kerja sama SAR	56,578,000	56,577,830
		Penyelenggaraan Regional Meeting (INSARAG)	332,849,000	321,107,355
		Workshop Kerja Sama SAR Luar Negeri	172,500,000	171,598,650
	Persentase kerja sama di bidang SAR yang ditindaklanjuti	Penyusunan dokumen Kerja Sama SAR	-	-
		Penyelenggaraan pertemuan kerja sama SAR luar negeri	-	-
		Penyelenggaraan pertemuan kerja sama SAR dalam negeri	-	-
		Workshop kerja sama SAR dalam negeri	-	-
		Penyusunan Juknis tentang Kerja sama SAR	-	-
		Penyelenggaraan Regional Meeting (INSARAG)	-	-
		Workshop Kerja Sama SAR Luar Negeri	-	-

Dipindai dengan CamScanner

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Pagu Revisi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan	428,632,000	427,204,500
		Rapat Kerja Basarnas	499,520,000	499,519,400
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Capaian Kinerja	Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja	413,391,000	408,566,600
	Nilai Peningkatan Akuntabilitas Kinerja (RB)	Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja		
	Nilai atas Evaluasi Kinerja Anggaran	Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan	427,520,000	426,369,600
Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatatn halaman IV DIPA	Penyusunan RKAKL Basarnas	978,193,000	973,269,186
	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	Penyusunan RKAKL Basarnas		
	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	Rapat Koordinasi Perencanaan Basarnas	520,241,000	519,057,748

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PENUTUP

Sesuai dengan pembahasan pencapaian kinerja pada bab sebelumnya, berikut kesimpulan dan tindak lanjut hasil evaluasi dan analisa capaian kinerja indikator dan sasaran pada Biro Perencanaan.

A. KESIMPULAN

Secara garis besar tingkat capaian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2021 dapat dikatakan memuaskan dengan rata-rata capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama sebesar 100,22%. Namun terdapat beberapa indikator kinerja yang realisasinya tidak memenuhi target, yaitu 2 indikator dari 9 indikator. Indikator yang tidak memenuhi target adalah Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja, serta Indikator Nilai atas evaluasi kinerja anggaran. Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, serta merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Biro Perencanaan pada khususnya dan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada umumnya.

B. TINDAK LANJUT

Menindaklanjuti hasil pengukuran capaian kinerja pada Biro Perencanaan, untuk indikator kinerja yang realisasinya telah memenuhi target seluruh bidang di lingkungan Biro Perencanaan akan melaksanakan program dan kegiatan yang lebih baik sehingga keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dapat dipertahankan dan diharapkan dapat lebih ditingkatkan. Sedangkan untuk indikator kinerja yang realisasinya belum memenuhi target, Biro Perencanaan akan mencoba menerapkan program dan kegiatan yang lebih baik lagi, yaitu:

1. Untuk peningkatan capaian kinerja pada Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan

Dipindai dengan CamScanner

Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja perlu:

- Dilaksanakannya diklat/bimtek penyusunan dokumen AKIP
- Asistensi terkait penyusunan dokumen AKIP lebih baik lagi

Selain itu sebagai pendukung dalam tugas pelayanan pencarian dan pertolongan yang diemban oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka Biro Perencanaan perlu terus meningkatkan pelaksanaan tugasnya dengan lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dengan unsur-unsur lainnya baik di lingkungan Biro Perencanaan maupun di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan lainnya serta instansi/organisasi lain. Kerja sama yang telah terjalin dengan baik ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga kinerja Biro Perencanaan secara keseluruhan dapat berlangsung secara maksimal.

C. DAFTAR PUSTAKA

– Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang* Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Jakarta.

– Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjuan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.

– Indonesia. 2016. *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016* tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186. Jakarta.

– Indonesia. 2016. *Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 4 Tahun 2016* tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

– Indonesia. 2017. *Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017* tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820. Jakarta.

– Indonesia. 2021. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2021 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan *Nomor SP-DIPA-107.01/2021 Tahun 2021*. Jakarta.

Dipindai dengan CamScanner

– Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP. Jakarta.

– Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2021 ini disusun. Kiranya Laporan Kinerja Tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Biro Perencanaan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana kinerja, rencana anggaran dan rencana strategis dimasa yang akan datang. Biro Perencanaan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Dipindai dengan CamScanner

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
BIRO PERENCANAAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SK.1. Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	1. Persentase kerja sama di bidang SAR	100%	100%	100%
	2. Persentase kerja sama di bidang SAR yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
SK.2. Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuanga	3. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	70	71,84	102,30%
	4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja	70,3	65,15	92,67%
	5. Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	7,5	7,98	105,20%
	6. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	94	93,8	99,79%
SK.3. Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	7. Persentase anggaran yang tidak tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	98%	99,99%	102,03%
	8. Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%	100%	100%
	9. Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	100%	100%	100%
RATA RATA CAPAIAN				100,22%

Pagu Anggaran : Rp. 4,686,735,000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 4,655,165,444,-

Jakarta, Februari 2022
Kepala Biro Perencanaan

Moh. Barokna Haulah
Pembina Utama Muda (IV/c)

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Barokna Haulah
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Dianta Bangun, M.Kes.
Jabatan : Sekretaris Utama
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Julii 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
Drs. Dianta Bangun, M.Kes.	Moh. Barokna Haulah
Pembina Utama Madya (IV/d)	Pembina Utama Muda (IV/c)

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BIRO PERENCANAAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase kerja sama di bidang SAR	100%
		Persentase kerja sama di bidang SAR yang ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	73%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran KInerja, Pelaporan dan Capaian Kinerja	70,3
		Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	7,85
		Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	94
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang tidak tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	98%
		Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%
		Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dan dokumen Trilateral Meeting	100%

Pagu Anggaran : Rp. 10.517.363.000,-

Jakarta, Juli 2021

Sekretaris Utama	Kepala Biro Perencanaan
Drs. Dianta Bangun, M.Kes.	Moh. Barokna Haulah
Pembina Utama Madya (IV/d)	Pembina Utama Muda (IV/c)

Dipindai dengan CamScanner

Manual Indikator Kinerja
Biro Perencanaan

IKSK.11.1.1.a				
Perspektif* :	*stakeholder perspective*			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri, penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kerja sama di bidang SAR			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Indikator ini mengukur persentase jumlah penyusunan dokumen kerja sama pencarian dan pertolongan dibandingkan dengan jumlah kerja sama SAR yang direncanakan.			
	Formula			
	%= (Jumlah Dokumen Kerjasama SAR) / (Jumlah Dokumen Kerjasama SAR yang direncanakan) x 100%			
	Tujuan			
	Indikator ini bertujuan agar kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan semakin meningkat			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	( ) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Perencanaan			
Sumber Data:	Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi			
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	(X) Tahunan

Dipindai dengan CamScanner

IKSK.11.1.1.b				
Perspektif* :	*stakeholder perspective*			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri, penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri,			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kerja sama di bidang SAR yang ditindaklanjuti			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Indikator ini mengukur jumlah perjanjian kerjasama yang ditindaklajuti dari perjanjian kerjasama yang sudah ada melalui jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan			
	Formula			
	%= (Jumlah Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti) x 100% (Jumlah Perjanjian Kerjasama SAR yang ada)			
	Tujuan			
	untuk mengetahui tindaklanjut dari kerja sama yang sudah ada			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	( ) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Perencanaan			
Sumber Data:	Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi			
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	(X) Tahunan

Dipindai dengan CamScanner

IKSK.12.1.1.a				
Perspektif* :	*(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)*			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, disebutkan bahwa Pimpinan K/L melaksanakan pengendalian, pelaksanaan rencana pembangunan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur rata-rata kesesuaian antara target dengan capaian kegiatan/fisik, dan kesesuaian antara target dengan capaian anggaran. Pengendalian program dan anggaran dilihat dari hasil pemantauan monitoring, pemantauan aplikasi, dan laporan berkala.			
	Formula			
	% = ((target kegiatan/capaian kegiatan) + (target anggaran/capaian anggaran))/2			
	Tujuan			
	Evaluasi dilaksanakan untuk dapat memantau pelaksanaan kegiatan dan pelaporan serta untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	( ) Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Perencanaan			
Sumber Data:	Laporan monitoring, aplikasi pemantauan kegiatan dan anggaran			
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan	(X) Triwulanan	( ) Semesteran	(X) Tahunan

Dipindai dengan CamScanner

IKSK.12.1.1.b				
Perspektif* :	*learn dan growth*			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, disebutkan bahwa Pimpinan K/L melaksanan Pengendalian, pelaksanaan rencana pembangunan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.			
	Formula			
	Komponen yang dinilai : a. Perencanaan Kinerja (30) b. Pengukuran Kinerja (30) c. Pelaporan Kinerja (15) d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25) Nilai hasil evaluasi AKIP: Predikat AA (Nilai > 90 –100) - Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai > 80 – 90) - Memuaskan Predikat BB (Nilai > 70 – 80) - Sangat Baik Predikat B (Nilai > 60 - 70) - Baik Predikat CC (Nilai > 50 – 60) - Cukup (Memadai) Predikat C (Nilai > 30 – 50) - Kurang Predikat D (Nilai > 0 – 30) - Sangat Kurang			
	Tujuan			
	memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitasi instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya			
Satuan Pengukuran:	Nilai			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	( ) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Perencanaan - Kementerian PAN-RB			
Sumber Data:	Hasil Evaluasi dari Kementerian PAN-RB			
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	(X) Tahunan

Dipindai dengan CamScanner

IKSK.12.1.1.c				
Perspektif* :	*(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)*			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, disebutkan bahwa Pimpinan K/L melaksanan Pengendalian, pelaksanaan rencana pembangunan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Nilai penguatan akuntabilitas diperoleh dari hasil evaluasi pada LKE RB yang terdiri dari aspek: a. pemenuhan yaitu : keterlibatan pimpinan, pengelolaan akuntabilitas kinerja b. reform, yaitu: Efektifitas dan Efisiensi anggaran, pemanfaatan aplikasi akuntabilitas, pemberian reward dan punishment, kerangka logis kinerja.			
	Formula			
	Berdasarkan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PANRB			
	Tujuan			
	Tujuan evaluasi ini adalah untuk menciptakan lembaga yang akuntabel dan berkinerja tinggi			
Satuan Pengukuran:	Nilai			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	( ) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Perencanaan			
Sumber Data:	Hasil Evaluasi RB Kementerian PAN-RB			
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	(X) Tahunan

Dipindai dengan CamScanner

IKSK.12.1.1.d		
Perspektif* :	*Internal Process*	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, disebutkan bahwa Pimpinan K/L melaksanan Pengendalian, pelaksanaan rencana pembangunan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.	
Indikator Kinerja Individu:	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan instrumen penting untuk peningkatan kualitas implementasi Penganggaran berbasis kinerja (PBK) melalui penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP). Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasidalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran dilaksanakan dengan mengisi capaian kinerja oleh satker melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) sebagai alat monitoring capaian kinerja yaitu: a. kualitas data baik, tidak ada data anomali atas pengisian capaian kinerja b. pengisian capaian kinerja sekurang-kurangnya dilakukan 2 kali dalam setahun. Badan Nasional Pencarian dan Perolongan termasuk dalam K/L berkategori pagu kecil (dibawah 2,5 triliun)	
	Formula	
	Diketahui dari aplikasi SMART : smart.kemenkeu.go.id	
	Tujuan	
	Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran ini merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk memastikan apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan yang direncanakan (Proving) dan untuk memberi feedback bagi proses penganggaran berikutnya (improving)	
Satuan Pengukuran:	Nilai	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	( ) Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan	

Dipindai dengan CamScanner

Unit/Pihak Penyedia Data:	Seluruh UPT dan Unit Eselon II Kantor Pusat			
Sumber Data:	Realisasi anggaran, Progres pekerjaan, Laporan Triwulan			
Periode Pelaporan:	(X) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	( ) Tahunan

Dipindai dengan CamScanner

IKSK.12.1.2.a.		
Perspektif* :	*Internal Process*	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Penyusunan rencana kerja yang baik dan benar dengan mengacu kepada arah kebijakan dan direktif presiden melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional diharapkan dapat meminimalisir blokir anggaran. Pemblokiran anggaran menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran. Beberapa penyebab anggaran masuk dalam Catatan Halaman IV DIPA atau dibintangi akibat kesalahan dalam perencanaan, antara lain data dukung yang kurang lengkap, proporsi anggaran yang kurang tepat, penelahaan dilakukan secara on-line dan waktu yang singkat, mengakibatkan penjelasan pada waktu pendalaman terhadap kegiatan-kegiatan yang disampaikan belum maksimal	
	Formula	
	%=((Jumlah anggaran yang tidak diblokir)/(Jumlah pagu anggaran pada DIPA)) x 100%	
	Tujuan	
	Untuk mengetahui sejauh mana unit kerja dan UPT menerapkan peraturan terkait pengusulan anggaran unit kerja dan UPT antara lain berupa kelengkapan data dukung dan dokumen lain yang diperlukan dalam pengusulan anggaran	
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	( ) Outcome	( ) Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Unit kerja dan UPT	

Dipindai dengan CamScanner

Sumber Data:	Dokumen usulan anggaran yang diblokir oleh Kementerian Keuangan			
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	(X) Tahunan

Dipindai dengan CamScanner

IKSK.12.1.2.b				
Perspektif* :	*Internal Process*			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Untuk mengetahui sejauh mana unit kerja dan UPT menyerahkan dokumen usulan rencana dan program tepat waktu			
	Formula			
	% = Jumlah Unit Kerja dan UPT yang menyampaikan tepat waktu x100% Jumlah seluruh Unit Kerja dan UPT			
	Tujuan			
	Untuk mengetahui jumlah unit kerja dan UPT yang menyampaikan data usulan rencana dan program tepat waktu			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	( ) Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Unit kerja dan seluruh UPT			
Sumber Data:	Dokumen usulan rencana dan program, Rekapitulasi pengumpulan dokumen			
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	(X) Tahunan

Dipindai dengan CamScanner

IKSK.12.1.2.c				
Perspektif* :	*Internal Process*			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Untuk mengetahui sejauh mana Biro Perencanaan melaksanakan kesepakatan yang ditetapkan dalam dokumen pertemuan tiga pihak (trilateral meeting)			
	Formula			
	%= ((Jumlah anggaran PN yang disetujui saat trilateral meeting)/Jumlah usulan pagu indikatif) x 100%			
	Tujuan			
	Untuk mengetahui kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam Dokumen pertemuan tiga pihak (trilateral meeting)			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	( ) Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Perencanaan - Biro Umum			
Sumber Data:	Dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen kesepakatan pertemuan			
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	(X) Tahunan

Dipindai dengan CamScanner

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
BASARNAS
Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720
http://www.basarnas.go.id
E-mail : basarnas@basarnas.go.id
Telp. : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 - (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

Nomor : B/1183/PR.02.02/VIII/BSN-2021 Jakarta, 16 Agustus 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Para Koordinator/Subkoordinator
Biro Perencanaan

di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana disebutkan bahwa Renstra harus direviu secara berkala. Terkait dengan hal tersebut, akan dilaksanakan Reviu Renstra Biro Perencanaan secara *online* melalui aplikasi zoom pada :

Hari/ Tanggal : Senin/ 16 Agustus 2021
Pukul : 09.00 WIB - selesai
Meeting ID : 843 880 3610
Passcode : evalapoke
Pimpinan : Kepala Biro Perencanaan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan,

Moh. Barokna Haulah
Pembina Utama Muda (IV/c)

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal	:	Senin, 16 Agustus 2021
Waktu	:	09.00 WIB s/d selesai
Tempat	:	zoom meeting
Acara	:	1. Reviu Renstra Biro Perencanaan 2020-2024
		2. Reviu Perjanjian Kinerja 2021 Biro Perencanaan
Pimpinan Rapat	:	Kepala Biro Perencanaan
Peserta Rapat	:	1. Para Koordinator di lingkungan Biro Perencanaan
		2. Para Subkoordinator di lingkungan Biro Perencanaan
		3. Staf Biro Perencanaan

Hasil Pembahasan Rapat :

a. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 tentang Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang merupakan perwujudan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang semula berbasis poin kegiatan, pada peraturan ini berbasis *outcome*. Salah satu perubahan penting dari penilaian kinerja pegawai negeri sipil adalah penilaian kinerja wajib dilaksanakan dalam kerangka system manajemen kinerja pegawai negeri sipil yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjut penilaian kinerja yang dikelola dalam suatu system informasi kinerja.

   Dengan adanya Permenpan yang baru ini, diharapkan adanya pengorganisasian antara capaian individu dan capaian organisasi. Hal ini dikarenakan capaian individu sangat berperan penting bagi pencapaian kinerja organisasi. Untuk menjembatani hal tersebut, akan ada program dialog kinerja antara atasan dan bawaha dalam rangka penyelarasan kinerja.

b. Basarnas telah mereviu Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-154/OT.01/VI/BSN-2021 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

c. Terkait dengan hal tersebut di atas, Biro Perencanaan akan mereviu dokumen SAKIP untuk penyelarasan indikator kinerja maupun target baik pada dokemen

Dipindai dengan CamScanner

Renstra 2020-2024 maupun Perjanjian Kinerja 2021. Berikut ini perubahan indikator kinerja Biro Perencanaan.

Indikator Kinerja lama

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase tingkat kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan
		Persentase kerjasama luar negeri di bidang pencarian dan pertolongan yang bisa ditindaklanjuti
		Persentase kerjasama dalam negeri di bidang pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan
	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase satuan kerja yang menyampaikan Dokumen SAKIP tepat waktu dan sesuai NSPK / Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja dan perjanjian kinerja pada Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		Persentase pemantauan pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada Unit Kerja dan UPT Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		Nilai atas evaluasi kinerja anggaran
	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase pemenuhan target pendanaan sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program

Dipindai dengan CamScanner

Indikator Kinerja baru

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase kerja sama di bidang SAR
		Persentase kerja sama di bidang SAR yang ditindaklanjuti
2	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran KInerja, Pelaporan dan Capaian Kinerja
		Nilai penguatan akuntabilitas kinerja
		Nilai atas evaluasi kinerja anggaran
3	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA
		Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program
		Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dan dokumen Trilateral Meeting

Dipindai dengan CamScanner

d. Selanjutnya akan dilaksanakan dialog kinerja untuk pembagian peran dari masing-masing Koordinator/Subkoordinator dan staf Biro Perencanaan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Biro Perencaan.

Jakarta, Agustus 2021

Notulis,



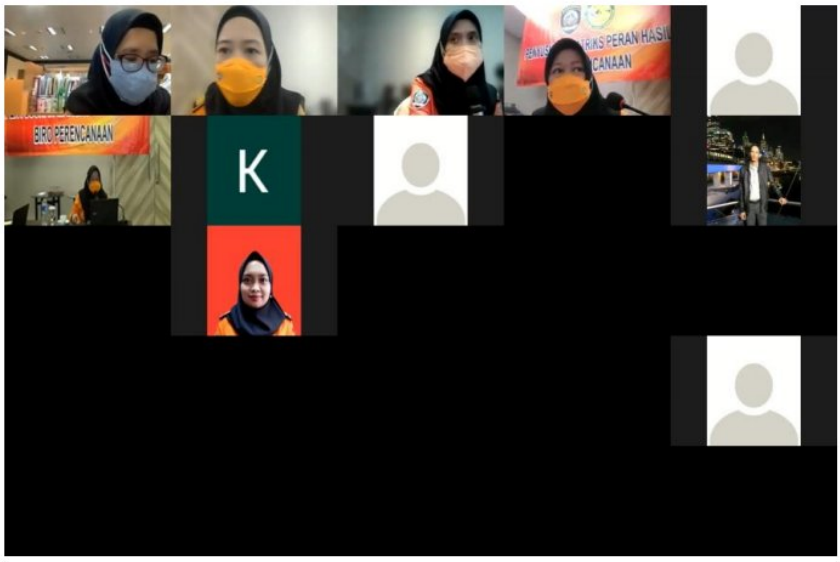
Dyah Reno Hardiany, S.T.M.T.
Pembina Tk. I (IV/b)

Dipindai dengan CamScanner

ZOOM MEETING REVIU RENSTRA 2020-2024 DAN PK 2021

BIRO PERENCANAAN





Dipindai dengan CamScanner